ARTIKEL
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DI KOTA BANDUNG

NUR MUKALAPIL MILLAH
NPM: 218010032

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
2025

ABSTRAK

Ketahanan keluarga sangat penting dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, maupun psikologis. Tingginya angka perceraian, kemiskinan, serta pengabaian terhadap anak menjadi indikator rapuhnya institusi keluarga. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi secara nasional. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Salah satu program strategis dalam regulasi ini adalah Program MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program MOTEKAR di Kota Bandung, khususnya efektivitasnya dalam memperkuat ketahanan keluarga. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah menjangkau lima dimensi ketahanan keluarga yaitu legalitas dan struktur, fisik, ekonomi, psikososial, dan budaya namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan jumlah pelaksana, kurangnya kapasitas teknis,

rendahnya kesadaran masyarakat, resistensi terhadap pendekatan non-materi, serta lemahnya mekanisme supervisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program MOTEKAR memiliki potensi besar sebagai model penguatan ketahanan keluarga berbasis komunitas. Namun, diperlukan peningkatan dalam rekrutmen dan pelatihan pelaksana, penguatan komunikasi publik, serta kolaborasi antar-stakeholder untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program.

Kata kunci: ketahanan keluarga, kebijakan publik, program MOTEKAR, intervensi sosial, Kota Bandung

ABSTRACT

Family resilience is crucial in facing social, economic, and psychological challenges. High divorce rates, poverty, and child neglect are indicators of the fragility of the family institution. West Java Province is recorded as the region with the highest unemployment rate nationally. This condition prompted the West Java Provincial Government to issue Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning the Implementation of Family Resilience Development. One of the strategic programs in this regulation is the MOTEKAR (Family Resilience Motivator) Program. This study aims to analyze the implementation of the MOTEKAR Program in Bandung City, particularly its effectiveness in strengthening family resilience. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews with key informants, field observations, documentation studies, and literature reviews.

The results show that the program has reached five dimensions of family resilience: legality and structure, physical, economic, psychosocial, and cultural, but its implementation still faces various challenges. Some of the main obstacles include limited number of implementers, lack of technical capacity, low public awareness, resistance to non-material approaches, and weak monitoring mechanisms. This study concludes that the MOTEKAR Program has great potential as a model for strengthening community-based family resilience. However, improvements are needed in recruitment and training of implementers, strengthening public communication, and collaboration between stakeholders to ensure the program's desirability and effectiveness.

Keywords: family resilience, public policy, MOTEKAR program, social intervention, Bandung City

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga adalah kelompok kecil dalam tatanan sosial yang memiliki tempat tinggal yang sama dan melakukan aktivitas kerjasama ekonomi dan reproduksi. (Iver & Charles, 1981: 139). BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mengartikan ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis dalam keluarga yang menunjukkan kemampuan keluarga untuk menghadapi mengelola dan mengatasi tekanan atau tantangan hidup, serta menjaga fungsi - fungsi dasarnya demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, psikologis dan spiritual.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, mencapai 48.220.094 juta penduduk pada Desember 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 kasus perceraian mencapai 291.677 kasus, menunjukkan pelonjakkan kembali ke angka 53,5% dari tahun sebelumnya. Kondisi Jawa Barat yang menjadi Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tentu secara tidak langsung membuat dinamika sosial yang cukup tinggi juga dalam menimbulkan kompleksitas beragam permasalahan, termasuk kerentanan keluarga yang berakhir pada perceraian sehingga menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi sebanyak 98.088 kasus.

Berdasarkan pada kondisi tersebut dan mengacu pada Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan

Ketahanan Keluarga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) sebelum berubah pada tahun 2015 menjadi Dinas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), mengembangkan program inovatif yang diberi nama Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR).

Data infografik Diskominfo Jawa Barat (Jabar Digital Service), menunjukkan pada tahun 2021 terdapat 474.522 jiwa penduduk Jawa Barat berstatus cerai hidup. Kota Bandung menempati posisi pertama pemilik akta cerai sebanyak 53.335. Angka perceraian yang tinggi di Kota Bandung menjadi sorotan serius dalam konteks ketahanan keluarga, tingginya kasus perceraian mencerminkan kerapuhan fungsi dan ikatan keluarga di masyarakat. Angka perceraian yang tinggi berdampak pada timbulnya masalah sosial seperti, gangguan psikologis pada anak akibat konflik orang tua dan peningkatan risiko kemiskinan pasca-cerai. Situasi ini menggarisbawahi urgensi adanya intervensi untuk memperkuat ketahanan keluarga.

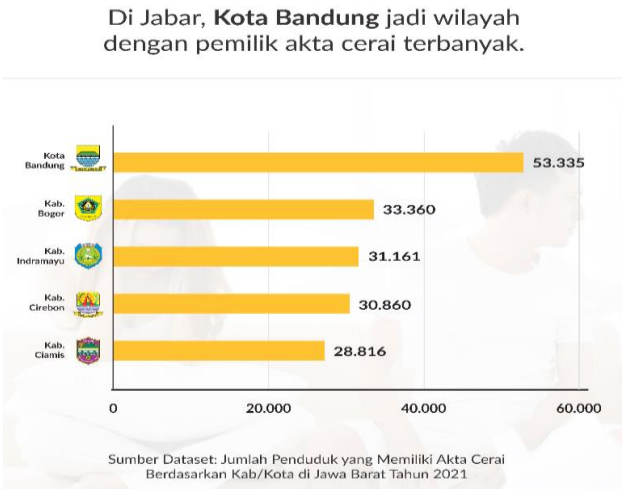

Gambar 1. Data Pemilik Akta Cerai Di Jawa Barat

Sumber: Diskominfo Jabar, 2023.

Hal ini menunjukkan implementasi program MOTEKAR belum berjalan optimal dan menghadapi berbagai tantangan diantaranya adalah kesulitan pendekatan terhadap masyarakat yang lebih menginginkan bantuan material, keterbatasan jumlah motivator, lemahnya monitoring dari pemerintah provinsi, serta resistensi masyarakat terhadap intervensi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut melalui program MOTEKAR di Kota Bandung, serta mengkaji hambatan dan upaya strategis dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut melalui program MOTEKAR di Kota Bandung, serta mengkaji hambatan dan upaya strategis dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi langsung, wawancara mendalam kepada lima informan kunci (pejabat DP3A dan tenaga MOTEKAR), serta dokumentasi data sekunder. Analisis data menggunakan teknik model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Triangulasi digunakan untuk validasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program MOTEKAR dijalankan di empat kecamatan di Kota Bandung yaitu Kecamatan Mandalajati, Babakan Ciparay, Cibeunying Kidul, dan Bojongloa Kaler.

1. Pencapaian Program Berdasarkan Dimensi Ketahanan Keluarga

- Legalitas dan Struktur Keluarga**,** fokus pada pemenuhan dokumen legal seperti akta kelahiran dan surat nikah. Pendampingan di aspek ini cukup tinggi, mencapai 35% dari total kegiatan.

- Ketahanan Fisik, meliputi kesehatan ibu dan anak, pola konsumsi pangan, dan sanitasi. Ini menjadi dimensi dengan capaian tertinggi (38%), menunjukkan urgensi dan respon positif masyarakat.
- Ketahanan Ekonomi, pemberdayaan keluarga melalui pelatihan keterampilan dan akses informasi ekonomi. Capaian masih rendah karena keterbatasan modal dan daya dukung dari pelaksana.
- Ketahanan Psikososial, melibatkan upaya meningkatkan komunikasi dalam keluarga, pengasuhan anak, dan kesehatan mental. Tantangan terbesar terdapat pada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dimensi ini.
- Ketahanan Sosial Budaya, pendekatan nilai budaya lokal dan relasi sosial antaranggota keluarga. Kegiatan ini masih minim karena kompleksitas pengukuran dampaknya.

2. Evaluasi Implementasi Program Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn

a. **Standar dan Sasaran Kebijakan**, sasaran program sudah ditetapkan melalui indikator ketahanan keluarga, namun **realisasinya belum optimal**. Kota Bandung seharusnya menjangkau 10.000 keluarga per bulan secara kolektif, tetapi capaian masih jauh dari angka tersebut. Ini disebabkan oleh keterbatasan pelaksana dan rentang waktu kerja yang singkat.

b. **Sumber Daya**, Jumlah tenaga MOTEKAR menurun dari 475 menjadi 463 se-Jawa Barat. Di Kota Bandung, hanya tersedia **4 orang pelaksana** untuk 4 kecamatan. Tidak ada rekrutmen baru yang dilakukan karena keterbatasan anggaran.

c. **Komunikasi Antarorganisasi**, komunikasi antara DP3AKB Provinsi dan Kota Bandung tergolong baik. Namun, **sosialisasi kepada masyarakat belum merata**, membuat sebagian besar warga tidak mengenal fungsi dan tujuan program.

d. **Karakteristik Badan Pelaksana**, Pelaksana berasal dari unsur masyarakat, dengan semangat tinggi, tetapi **mayoritas tidak memiliki latar belakang keilmuan yang relevan** seperti psikologi, kesehatan masyarakat, atau ilmu keluarga. Hal ini memengaruhi kualitas intervensi.

e. **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**, hambatan utama muncul dari **preferensi masyarakat terhadap bantuan materi**.

Banyak keluarga enggan didampingi jika tidak ada bentuk bantuan langsung (sembako, uang tunai), menunjukkan persepsi yang keliru terhadap intervensi sosial.

f. **Disposisi/Sikap Pelaksana**, pelaksana memiliki komitmen kuat, dibuktikan melalui pelaporan rutin dan partisipasi dalam pelatihan. Namun, **supervisi dari pemerintah provinsi lebih banyak dilakukan secara daring**, tidak menyentuh kondisi faktual di lapangan.

3. Hambatan Pelaksanaan Program

Berdasarkan temuan lapangan, hambatan utama implementasi adalah Jumlah pelaksana yang sangat terbatas untuk cakupan wilayah yang luas, kapasitas teknis pelaksana yang belum memadai, keterbatasan dana operasional dan kurangnya sarana bantu edukasi, resistensi masyarakat terhadap program non-materi dan minimnya pengawasan dan monitoring langsung di lapangan.

4. Upaya Perbaikan dan Inovasi Program

Beberapa upaya perbaikan yang mulai dilakukan, antara lain pemanfaatan media digital (WhatsApp Group, Zoom) untuk pendampingan dan koordinasi, pelatihan intensif (bimtek) kepada pelaksana agar memahami pendekatan persuasif dan berbasis budaya, pengembangan kolaborasi dengan mahasiswa magang, komunitas lokal, dan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan, inisiatif pendataan berbasis RT/RW untuk mengidentifikasi keluarga rentan secara lebih akurat.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Program MOTEKAR merupakan salah satu bentuk inovasi kebijakan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga. Di Kota Bandung, pelaksanaan program ini menunjukkan adanya capaian positif terutama dalam dimensi ketahanan fisik dan legalitas keluarga. Pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan oleh tenaga MOTEKAR menjadi kekuatan

utama program ini, terutama karena adanya kedekatan emosional dan budaya antara pelaksana dengan masyarakat sasaran.

Berdasarkan analisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn, terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya ideal karena terdapat celah pada aspek standar sasaran, sumber daya, disposisi pelaksana, dan konteks sosial yang dihadapi. Program MOTEKAR memang potensial menjadi model replikasi intervensi sosial yang humanis, namun perlu penguatan lebih lanjut agar berdampak luas dan berkelanjutan. Program MOTEKAR belum mampu menjangkau sasaran secara optimal, baik dari sisi kuantitas keluarga dampingan maupun dari kualitas perubahan yang diharapkan.

2. Saran

- **Peningkatan Jumlah dan Kapasitas Tenaga MOTEKAR**, pemerintah daerah perlu melakukan rekrutmen tambahan tenaga MOTEKAR, khususnya di wilayah urban seperti Kota Bandung yang memiliki kompleksitas masalah sosial tinggi. Selain itu, pelatihan intensif secara berkelanjutan perlu diberikan agar pelaksana memiliki kompetensi dalam pendekatan komunikasi keluarga, konseling dasar, dan pemetaan sosial berbasis data.
- **Penguatan Dukungan Anggaran dan Sarana Operasional**, program ini membutuhkan dukungan logistik yang memadai, baik dalam bentuk alat bantu edukasi, transportasi lapangan, maupun insentif kerja yang layak. Tanpa dukungan ini, efektivitas pelaksanaan akan terus terhambat.
- **Strategi Komunikasi Publik yang Inklusif**, pemerintah perlu mengembangkan kampanye publik yang mampu mengubah paradigma masyarakat terkait makna bantuan sosial. Ketahanan keluarga harus diposisikan sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan semata bantuan langsung tunai.
- **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Lapangan**, Pemerintah provinsi perlu membentuk sistem supervisi yang tidak hanya berbasis laporan daring, melainkan juga kunjungan lapangan berkala, studi dampak, dan pelibatan evaluator independen.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Suara Bebas

Anderson, J. (1975). *Public Policy Making*. New York: Holt, Renehart and Winston.

Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia.

Creswell, John, 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publications

Creswell, John W. 2009, "*Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dye, Thomas R., 1987. *Understanding Public Policy.* Prentince Hall, New Jersey

Frankenberger, T. R. (1998). *Indicators and data collection methods for assessing household food security*. Rome: Food and Agriculture Organization (FAO).

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.

Hartoyo. (2009). *Strategi koping, tekanan ekonomi, dan ketahanan keluarga di kawasan kumuh*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Jenkins, W.I. 1978. *Policy Analysis*. Martin Robertson: Oxford.

Jones, Charles O. 1970. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont, CA: Wadswort.

Lindblom, Charles Edward. 1968. *The Policy-Making Process*. Englewood Cliffs. N.J: Prentice Hall.

MacIver, R. M., & Page, C. H. (1954). *Society: An introductory analysis*. New York: Rinehart and Company, Inc.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

Sellang, K. 2016. *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Penerbit Ombak

Sunarti, E. (2017). *Modul ringkasan materi pelatihan diagnostik ketahanan keluarga*. Bogor: Penggiat Keluarga GiGa Indonesia.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). (2014). *Pedoman Umum Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Jawa Barat*. Bandung: BP3AKB